

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperindungi. ¹⁷

Dari kedua definisi tersebut, maka perlindungan merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada yang lemah. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang yang dianggap lemah.

Harjono mengemukakan bahwa perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019

kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.¹⁸

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga hal tersebut memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁰

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal

¹⁸ Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal, 357.

¹⁹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya. PT Bina Ilmu. Hal, 25.

²⁰ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. Hal, 3.

ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi : ²¹

1. *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*
2. *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari Negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

Warga Negara juga berhak untuk terhindar dan bebas dari tindakan penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia juga untuk melindungi warganya. Oleh karena itu negara membentuk lembaga dibidang hukum untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga negara juga berhak memperoleh suara politik dari negara lain.

²¹ Pasal 18 huruf (g) Undang-Undang Dasar 1945

Bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara yang bersangkutan.

Perlindungan atas jaminan rasa aman diatur pula pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :²²

“Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai , aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini”

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bermakna bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang merupakan hal yang sudah melekat sejak lahir dan tidak bisa untuk dicabut bahkan oleh Negara sekalipun, maka setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan bernegara yang damai, aman dan tentam yang menghormati dan melindungi serta melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

²² Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Perlindungan hukum dapat digunakan dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika

hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²³

Menurut Hadjon, perlindungan hukum untuk rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum kepada rakyat adalah dengan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki pengaruh yang bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.²⁴

b. Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan pada penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Umum juga Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

²³ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal, 20.

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Op.cit.* Hal, 4.

pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²⁵

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini mengarah pada perlindungan hukum yang berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum secara represif sama dengan penegakan hukum, hal ini karena proses dalam penyelesaian sengketa sampai pada tahap di pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum.

Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.²⁶

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut:²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

²⁵ *Ibid.* Hal, 4.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. Sinar Bakti. Hal, 102.

definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh besar terhadap tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif ini, maka pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum suatu peraturan khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif,

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk kaitannya dengan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu juga bersumber dari suatu konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Prinsip kedua yang dapat mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sarananya terdapat dua macam yaitu: ²⁸

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, menjelaskan bahwa subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong lebih bersifat hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum terdapat suatu pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan dalam hal sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum maupun oleh Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini.

3. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Dalam hal merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi

²⁸Sudut Hukum. 2015. *Perlindungan Hukum*.
<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 09 Januari 2019

dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Negara Barat bersumber pada konsep-konsep “*Rechtstaat*” dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.²⁹

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁰

Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³¹

²⁹ Philipus M. Hadjon, Op.cit Hal, 38

³⁰ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34.

³¹ *Ibid*.

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :³²

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap

³² Philipus M. Hadjon, Op.cit. Hal, 19

kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum.

Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Keselamatan Pejalan kaki dan Pesepeda

1. Pengertian Keselamatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keselamatan berasal dari kata selamat yang artinya adalah terhindar dari bencana; aman sentosa; sejahtera; tidak kurang suatu apapun; sehat; tidak mendapat gangguan; kerusakan; beruntung; tercapai maksudnya; tidak gagal.³³

Menurut Pasal 1 Ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019

risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia. Kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.”³⁴

Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bermakna bahwa keselamatan dalam berlalu lintas erat kaitannya dengan terjadinya kecelakaan di jalan. Setiap orang yang berkendara di jalan memiliki risiko kecelakaan dalam berlalu lintas yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor internal yaitu manusia maupun faktor eksternal berupa keadaan dari kendaraan yang digunakan, jalan yang dilalui maupun hambatan dari lingkungan yang tidak dapat diduga seperti halnya adanya tanah longsor maupun banjir yang dapat mengganggu akses jalan yang dilalui kendaraan.

Keselamatan jalan merupakan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kecelakaan yang terjadi di jalan raya yang tidak hanya disebabkan oleh faktor kondisi kendaraan maupun pengemudi, namun disebabkan pula oleh banyak faktor lain.³⁵

Menurut Bungin Burhan, Keselamatan berlalu lintas sangat dipengaruhi oleh disiplin pengendara, dengan meningkatkan disiplin pengendara dapat menambah tingkat keselamatan berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas terdiri dari Pemahaman peraturan peraturan lalu

³⁴ Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁵ Direktorat Jenderal Bina Marga. 2006. Keselamatan jalan. Diakses tanggal 21 Desember 2018

lintas, Tanggung jawab atas keselamatan diri dan orang lain, Kehatian, dan Kesiapan diri dan kondisi kendaraan.³⁶

Keselamatan berlalu lintas sangat dipengaruhi oleh Kondisi kendaraan dan jalan dengan meningkatkan Kondisi kendaraan dan jalan dapat menambah tingkat keselamatan dalam berlalu lintas. Keselamatan berlalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh, Kendaraan, Jalan, dan/ atau lingkungan.

Keselamatan merupakan hal yang sangat mendasar berkaitan dengan berkendara di jalan. Keselamatan dari pengguna jalan adalah tujuan dalam berlalu lintas baik pengendara roda empat, roda dua, pesepeda maupun pejalan kaki. Tidak dipungkiri keselamatan masih menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan mengingat beberapa faktor yang menyebabkan keselamatan sulit untuk terwujud.

Bahwa pengendara yang berkendara dengan hati-hati, selalu taat akan peraturan lalu lintas, bertanggungjawab akan keselamatan diri, orang lain dan kesiapan kondisi kendaraan yang digunakan akan berpengaruh besar terhadap keselamatannya dalam berlalu lintas.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keselamatan dalam berlalu lintas merupakan keadaan agar setiap orang terhindar dari risiko kecelakaan dalam berlalu lintas. Kecelakaan yang terjadi dapat

³⁶ Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik & Ilmu Sosial lainnya. Jakarta. Kencana Prenama Media Group. Hal, 94.

dikarenakan berbagai faktor seperti faktor manusianya sendiri yang termasuk dalam disiplin berkendara maupun faktor lain berupa kendaraan, jalan atau lingkungan.

2. Pengertian Pejalan Kaki

Menurut Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas.³⁷

Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bermakna bahwa pejalan kaki adalah setiap orang yang berada dalam lingkup lalu lintas dan melakukan aktifitas berjalan di ruang lalu lintas.

Menurut Pratama, Pejalan kaki adalah setiap orang yang menggunakan kaki, kursi roda, atau yang menggunakan alat yang digerakkan dengan tenaga manusia diluar sepeda Pejalan kaki disebut juga dengan istilah pedestrian yang berasal dari kata latin “pedos” (kaki).³⁸

3. Fasilitas Pejalan Kaki

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

“Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:

1. Trotoar;

³⁷ Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³⁸ Novalino Pratama. 2014. *Studi Perencanaan Trotoar di dalam Lingkungan kampus Universitas Sriwijaya Inderalaya*. Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan. Vol 2, Nomor 02 Juni 2014. Hal, 273.

2. *Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu;*
3. *Jembatan penyeberangan;*
4. *Terowongan penyeberangan.*”

Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993

Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, bermakna bahwa pejalan kaki difasilitasi pemerintah berupa trotoar yang dapat digunakan sebagai tempat berjalan, tempat penyeberangan dengan menggunakan rambu-rambu dan marka jalan untuk pejalan kaki agar tidak menyeberang sembarangan dan memotong arus lalu lintas juga adanya jembatan penyeberangan dan terowongan penyeberangan agar pejalan kaki lebih aman saat menyeberang jalan.

Selain dari fasilitas pejalan kaki yang ditetapkan oleh pemerintah, masih ada beberapa fasilitas yang dibutuhkan pejalan kaki yaitu pepohonan, pelindung terhadap cuaca, penerangan, dan sebagainya untuk lebih meningkatkan keinginan orang untuk berjalan kaki

4. Pengertian Pesepeda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pesepeda adalah orang yang mengendarai kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya; kereta angin.³⁹

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 04 Januari 2019

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Keselamatan merupakan tolak ukur terwujudnya lalu lintas yang ideal. Dalam mewujudkan keselamatan berkendara di jalan terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran dari belalu lintas.

Menurut Suraji dalam jurnal Marsaid, dkk, yang merupakan penelitian terdahulu pada tahun 2010 di wilayah Polres Kota Malang terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan pengguna lalu lintas khususnya bagi pejalan kaki dan pesepeda yang untuk kemudian ditujukan pada pengguna kendaraan bermotor antara lain:⁴⁰

a. Faktor manusia Manusia sebagai pengemudi yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan, dan mengarahkan kendaraan ke suatu tempat tertentu. Manusia merupakan faktor penting yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengemudi adalah suatu pekerjaan yang kompleks dan membutuhkan konsentrasi tinggi yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengemudi harus berhadapan dengan peralatan dan menerima pengaruh rangsangan dari keadaan sekelilingnya.

⁴⁰ Marsaid, dkk. 2013. *Faktor yang berhubungan dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Pada Wilayah Polres Kabupaten Malang*. Jurnal Ilmu Keperawatan. Vol 1 Nomor 2 Nopember 2013, Hal. 102.

Manusia sebagai pengemudi memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi seseorang dalam gaya mengemudi di jalan. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, dan sistem syaraf.

b. Faktor kendaraan Faktor kendaraan dalam hal ini yaitu sepeda motor merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih sepeda motor yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan adalah keputusan penting yang harus dipilih oleh seorang pengendara. Sepeda motor yang cocok akan memberi pengendara pengendalian yang baik. Pengendara harus mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor.⁴¹

Beberapa sepeda motor berukuran besar dan sangat berat. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan sepeda motor tersebut. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kaki pengemudi mampu berpijak ke tanah dengan baik ketika memilih sepeda motor. Kondisi internal dari sepeda motor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara sepeda

⁴¹ *Ibid.*

motor tersebut. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein dan lain sebagainya.

c. Faktor lingkungan fisik Faktor lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur, yaitu faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan yang terdiri dari kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka (rambu), dan tikungan/tanjakan/turunan tajam. Selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan kepadatan lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yaitu berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antar faktor jalan juga faktor lingkungan yang pada akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴²

Faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan dari pejalan kaki dan pesepeda dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas yang ada. Dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.⁴³

⁴² *Ibid.* Hal, 103

⁴³ Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Tinjauan Umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Pengertian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lalu lintas berarti berjalan bolak-balik dan hilir mudik, perihal perjalanan di jalan, dan bagaimana perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Penulis berpendapat, bahwa lalu lintas adalah setiap pemakai jalan baik perorangan maupun kelompok yang menggunakan jalan baik sebagai suatu ruang gerak/jalan kaki atau tanpa alat penggerak/kendaraan. Apabila dilihat dari pengertian lalu lintas itu, tidak lain adalah menyangkut gerak perpindahan orang atau barang dari satu tempat menuju ke tempat yang lain dengan menggunakan jalan sebagai sarana transportasi.⁴⁴

Menurut Direktorat Lalu Lintas Polri, Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁴⁵ Lalu lintas sebagai ruang pergerakan untuk kendaraan dan pengemudinya melakukan perpindahan satu tempat ke tempat yang lain melalui jalan. Lalu lintas ini tidak terlepas dari sarana dan prasarana yaitu jalan untuk berpindah.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa dikendalikan oleh

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 23 Desember 2018

⁴⁵ Direktorat Lalu Lintas Polri. 2009. *Paduan Praktis Berlalu Lintas*. Hlm,12.

seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.⁴⁶

Menurut Munawar, angkutan dapat didefinisikan sebagai pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.⁴⁷

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.⁴⁸

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bermakna bahwa angkutan dalam arti melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain bisa berupa perpindahan manusia ataupun barang dengan menggunakan kendaraan baik roda dua maupun roda empat dalam ruang lalu lintas jalan.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang berbunyi:

*Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*⁴⁹

⁴⁶ Adib Bahari. 2010. *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*. Jakarta. Pustaka Yustisia. Hlm,28.

⁴⁷ Ahmad Munawar. 2004. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*. Yogyakarta. Penerbit Beta Offset. Hal, 4.

⁴⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴⁹ Pasal 1 ayat (3) Peraturan pemerintah nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan bermakna bahwa jalan sebagai prasarana yang digunakan untuk melintas diatas maupun di bawah permukaan tanah yang berupa air. Jalan sebagai prasarana utama dalam melakukan lalu lintas yang digunakan untuk hilir mudik berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁵⁰ Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.⁵¹

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan dan pergerakan transportasi di Jalan. Lalu lintas berhubungan dengan gerakan atau perpindahan kendaraan dan pengemudinya di jalu lalu lintas jalan dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan yang menghubungkan berbagai aspek seperti kendaraan,

⁵⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengemudi dan jalan yang digunakan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian diatas lalu lintas merupakan sarana bagi setiap masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan baik roda empat, roda dua maupun pesepeda.

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan satu kesatuan sistem yang melibatkan jaringan lalu lintas, kendaraan juga sarana prasarana yang ada dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Sarana dan prasarana perlu untuk dipenuhi sesuai dengan standart operasional agar tercipta tertib berlalu lintas.

2. Asas, Tujuan dan Peran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Asas yang digunakan dalam Lalu lintas dan angkutan jalan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi : ⁵²

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;*
- b. asas akuntabel;*
- c. asas berkelanjutan;*
- d. asas partisipatif;*
- e. asas bermanfaat;*
- f. asas efisien dan efektif;*
- g. asas seimbang;*
- h. asas terpadu; dan*
- i. asas mandiri.”*

⁵² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan dalam pelaksanaannya mengacu pada beberapa asas untuk dijadikan dasar. Asas transparan erat kaitannya dalam hal keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berupa ketebukaan dalam informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat.

Asas akuntabel erat kaitannya dalam hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini erat kaitannya dengan asas berkelanjutan dalam hal kelanjutan pengembangan dan pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

Asas partisipatif asas dalam pengaturan peran serta masyarakat dalam segala proses terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang berkaitan dengan asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Asas efisien dan efektif dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga asas seimbang antara sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jalan dan penyelenggaranya yaitu pemerintah. Asas terpadu yang saling bergantung antara satu dengan lainnya dan asas mandiri yang erat kaitannya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan beberapa tujuan sebagai berikut:⁵³

⁵³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 1) Terwujudnya sebuah pelayanan dalam Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, Tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang penting dalam masyarakat guna mewujudkan berlalu lintas yang tertib, aman dan selamat. Tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan erat dengan peranan yang ditimbulkan di masyarakat.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bagi masyarakat sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, serta mampu memadukan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Munawar. *Loc.cit.*

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dan mendasar dalam pelaksanaan berlalu lintas di jalan. Berbagai asas yang mendasari adanya lalu lintas dan angkutan jalan agar tercipta berlalu lintas yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Tujuan dalam berlalu lintas agar mewujudkan berlalu lintas yang aman, tertib dan selamat yang dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan berkaitan erat dengan peranannya dalam stabilitas dan penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP membedakan tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan pada keduanya terletak pada peraturan, ancaman pidana dan penjatuhan sanksi. Pada kejahatan ancaman pidana dan penjatuhan sanksi lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana dan penjatuhan sanksi pada pelanggaran.

Pelanggaran menurut Moeljatno merupakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian.⁵⁵

⁵⁵ Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung. Rineka Cipta. Hal, 71.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, “Overtreding” merupakan perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.⁵⁶

Menurut Awaloedin pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lainnya⁵⁷

Berdasarkan uraian diatas maka pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang dapat diketahui perbuatannya setelah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan tersebut telah melanggar aturan hukum. Pelanggaran lalu lintas ini diancam dengan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana kejahatan.

⁵⁶ Prodjodikoro. 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*. Jakarta. Pustaka Media. Hal, 28.

⁵⁷ Naning Rondlon Awaloedin. 2003. *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*. Jakarta. Bina Ilmu. Hal, 19.